



Alamat Kantor :
Komplek Perkantoran Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka - Air Itam – Pangkalpinang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



RENSTRA 2023-2026



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat selesai tepat waktu. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pembangunan urusan pilihan Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Bangka Belitung.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, aspirasi para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dengan masa renstra 2023-2026. Sebagai Dokumen transisi, penyusunan Renstra mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 pengganti RPJMD dengan tetap disinkronkan dengan RPJMN selanjutnya.





Dalam implementasinya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2023-2026 dapat berfungsi sebagai:

- 1) Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan pertanian bagi seluruh pemangku kepentingan; dan
- 3) Pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan Kelautan dan Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi penyusunan usulan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan.

**KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
NIP. 19730809 199303 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
2.1.1 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	7
2.1.2 Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan	9
2.1.3 Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	11
2.1.4 Kepala Bidang Perikanan Tangkap	12
2.1.5 Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	14
2.1.6 Kepala Bidang Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15
BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2 Telaahan keselarasan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Resntra PD	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	28



BAB IV Tujuan Dan Sasaran	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan	32
BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan	35
5.1 Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan	35
5.2 Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan	37
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	43
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	43
BAB VII Indikator Kinerja Pd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd	94
7.1 Indikator Kinerja Pd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd	94
BAB VIII Penutup	99
8.1 Penutup	99
LAMPIRAN	
Berita Acara Verifikasi Renstra Perangkat Daerah	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 202 -2026	33
Tabel 4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kep. Babel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	94



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Renstra perangkat daerah merupakan rencana strategis yang disusun dalam kurun waktu 5 tahunan oleh perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ada untuk menyelesaikan permasalahan/isu pada bidang urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Renstra perangkat daerah disusun dengan mengangkat isu strategis bidang urusan yang akan diselesaikan berdasarkan analisa faktor kekuatan/strength (S), kelemahan/weakness (W), peluang/opportunity (O) dan tantangan/threat (T), atau yang lebih akrab dikenal dengan analisa SWOT. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, maka renstra yang akan disusun adalah rencana strategis bidang kelautan dan perikanan dengan jangka waktu 5 tahunan untuk menjawab permasalahan/isu strategis yang dihadapi yang merupakan hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal bidang kelautan dan perikanan.

Renstra berfungsi sebagai buku panduan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah 5 tahunan untuk menjawab isu strategis bidang kelautan dan perikanan yang telah dirumuskan di dalamnya. Renstra dapat juga diartikan sebagai *roadmap* atas semua usulan kegiatan yang dimunculkan tiap tahunnya oleh bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. *Roadmap* berfungsi sebagai justifikasi apakah usulan kegiatan yang diusulkan tiap tahunnya masih sesuai atau sudah melenceng jauh dari upaya untuk menjawab isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen renstra perangkat daerah.



Renstra disusun dengan mempertimbangkan ide dan masukan yang dirumuskan dalam berbagai pertemuan baik yang bersifat internal perangkat daerah atau dengan mengikutsertakan instansi lainnya maupun dengan mendengarkan langsung permasalahan yang ada dari hasil kunjungan lapangan ke masyarakat. Seluruh permasalahan/isu yang ada mulai diekstraksi dan diklasifikasi berdasarkan tingkat *urgensynya* (U), *seriousnessnya* (S) dan *growthnya* (G) atau lebih dikenal dengan istilah metode USG. Berbagai permasalahan/isu tadi ditakar dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, disamping itu juga harus dilihat seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani atau ditunda dan yang terakhir seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar lagi jika tidak segera ditangani.

Namun pada periode saat ini dimana tidak adanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dengan masa 2023–2026. Sehingga Renstra sebagai pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah hanya berlaku 4 tahun.

Dalam penyusunan renstra pada Dinas Kelautan dan Perikanan ini juga harus disusun dengan merujuk Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan didalam renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur juga dapat saling melengkapi antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu pula



halnya dari sisi pendanaan, jika sudah harmoni antara perencanaan pusat dan daerah maka, dana bantuan untuk menyelesaikan isu strategis di tingkat pemerintah daerah juga akan dengan lebih mudah dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Tiap alternatif strategi tadi disusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikatornya untuk dapat dinilai tingkat pencapaian dari masing-masing sasaran, program dan kegiatan yang diusulkan. Selain pendekatan secara perencanaan aksi, di dalam dokumen renstra perangkat daerah juga harus disusun rencana kebutuhan pembiayaannya sebagai ukuran awal dalam penentuan pagu indikatif perangkat daerah pada masing-masing tahun anggaran pelaksanaan pembangunan. Secara berkelanjutan, seluruh program dan kegiatan yang sudah disusun di dalam dokumen renstra ini akan dieksekusi melalui Renja Perangkat Daerah tiap tahunnya. Renja Perangkat daerah diharapkan tidak akan jauh melenceng dari arahan dan garis haluan yang sudah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D). Serta diperbaharui terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata



Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Renstra Dinas kelautan dan Perikanan ini disusun berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Kepmendagri terbaru yakni Kepmendagri Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjawab tantangan berdasarkan isu strategis yang telah dipetakan sebelumnya. Adapun tujuan yang ingin diraih adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk periode 5 tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra ini dibagi menjadi 8 Bab, dimana tiap bab memiliki karakteristik tersendiri.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang diperlukannya renstra ini, landasan hukum yang mendasarinya serta maksud dan tujuan disusunnya dokumen renstra ini.



Bab II digambarkan pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan pada Bab I, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada periode pelaksanaan renstra sebelumnya.

Bab III berisi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, menelaah keselarasan anatar Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen rencana pembangunan daerah RPD, menelaah Renstra K/L, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari perangkat daerah. Tujuan dan sasaran yang dimaksud disini adalah pada level dampak dari diberlakukannya Renstra ini kedepan nantinya. Berisi tujuan, sasaran serta indikatornya sebagai alat ukur keberhasilan.

Bab V berisi Strategi dan arah kebijakan. Masing-masing tujuan dan sasaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dirinci lebih detail bagaimana cara mencapainya melalui strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan.

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII penutup.



BAB II

Gambaran Pelayanan

Dinas Kelautan Dan Perikanan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D) dan diubah oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Institusi ini dijalankan oleh 95 orang Aparat Sipil Negara (ASN) dan 95 orang Tenaga Kontrak. Sebagai instansi yang mengurus sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dibantu oleh Kelembagaan yang sama di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Dan untuk kewenangan yang berada di tingkat pusat, DKP Provinsi dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

2.1.1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas menyelenggara fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- e. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;



- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan meliputi bidang pengelolaan ruang laut, bidang perikanan tangkap, bidang pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan, bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- d. menyelenggarakan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan;
- f. menyelenggarakan bidang pengelolaan ruang laut, bidang perikanan tangkap, bidang pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan, bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- g. menyelenggarakan Koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kelautan dan perikanan;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan SAKIP;
- l. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang kelautan dan perikanan;
- n. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- o. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2.1.2. Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan

Sekretariat mempunyai tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi meliputi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang
- c. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
- h. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang - undangan lingkup Dinas.
- j. penyelenggaraan dan pengordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas;
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan SAKIP;



- l. penyelenggaraan dan pengordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan social di bidang kelautan dan perikanan;
- n. penyelenggaraan dan pengordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- o. penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
- p. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- q. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Sekretariat meliputi:

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dinas;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan;
- e. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
- h. memverifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;



- i. memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
- j. memimpin dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas;
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan SAKIP;
- l. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- m. memverifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Kelautan Perikanan;
- n. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- o. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
- p. memimpin dan mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- q. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Subbag yaitu :

1. Subbag Perencanaan
2. Subbag Umum
3. Subbag Keuangan

2.1.3. Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi meliputi:



- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. penyelenggaraan pengelolaan ruang laut, pemanfaatan dan pengembangan ruang laut sesuai kewenangannya dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi:

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memimpin dan mengKoordinasikan pengelolaan ruang laut, pemanfaatan dan pengembangan ruang laut sesuai kewenangannya dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil;
- d. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
3. Seksi Pengelolaan Ruang Laut;

2.1.4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan



pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perikanan tangkap.

Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Perikanan Tangkap meliputi:

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
- b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- c. memimpin dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengembangan usaha perikanan tangkap,
- d. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
2. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan; dan
3. Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;



2.1.5. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- c. penyelenggaraan pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan meliputi:

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- c. menyelenggarakan pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan pembudidayaan ikan;



- e. menyelenggarakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Perikanan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
2. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

2.1.6. Kepala Bidang Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kebijakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil laut, pengawasan sumberdaya perikanan lintas Kabupaten/Kota dan pengawasan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil laut, pengawasan sumberdaya perikanan lintas Kabupaten/Kota dan pengawasan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;



- f. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penyelenggaran sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil laut, pengawasan sumberdaya perikanan lintas Kabupaten/Kota dan pengawasan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
- d. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil laut, pengawasan sumberdaya perikanan lintas Kabupaten/Kota dan pengawasan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- g. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

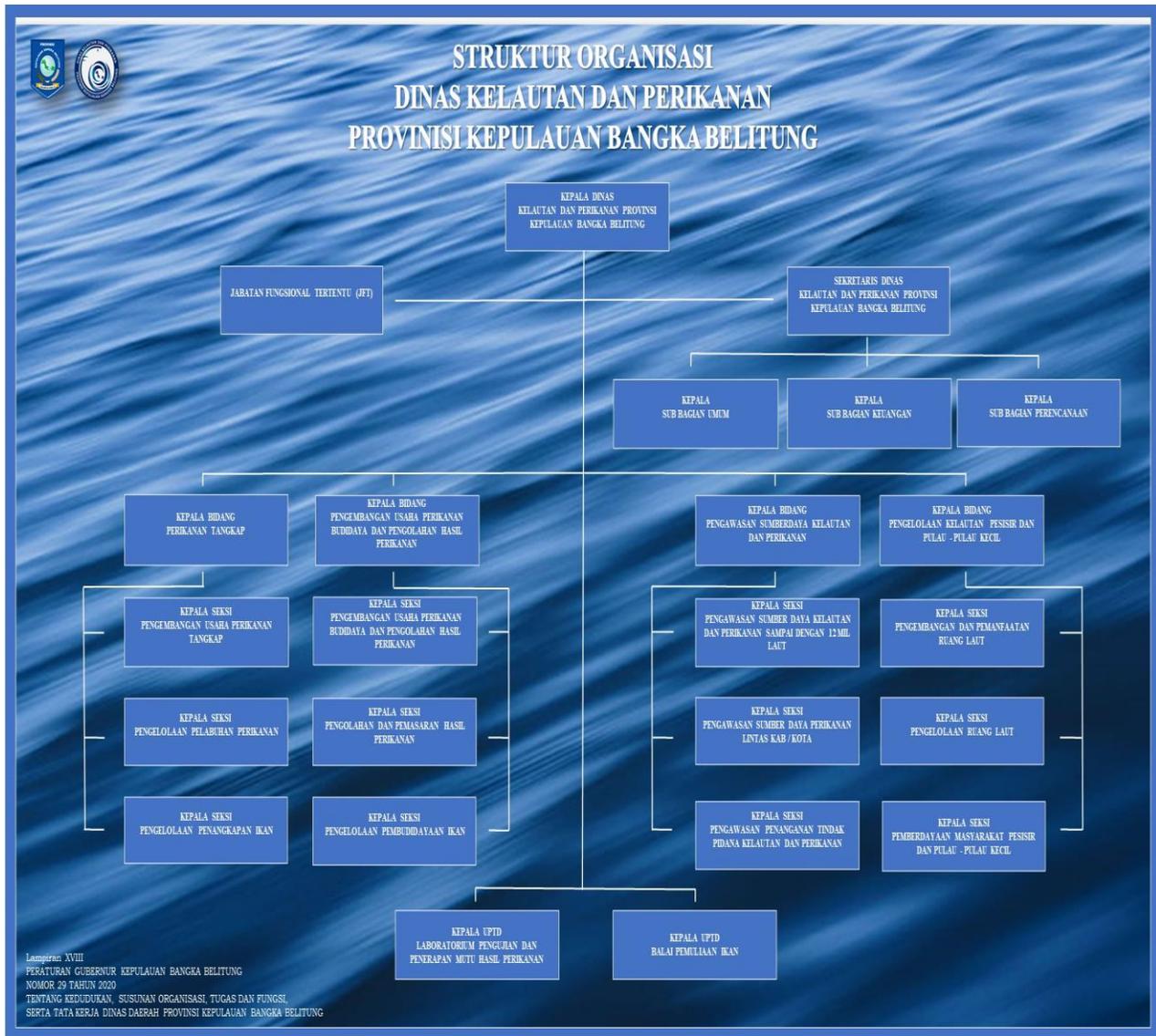
Bidang Perikanan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil Laut;
2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan Lintas Kabupaten/Kota; dan
3. Seksi Pengawasan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;

Di bawah ini disajikan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tanggal 29 Desember 2021.



Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Bagian Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BAB III

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana, prasarana dan kelembagaan serta tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan lingkungan strategis di Kepulauan Bangka Belitung. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelabuhan perikanan sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Permasalahan utama di pelabuhan perikanan Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan belum optimal dan harus segera di Bangun/Rehabilitasi serta belum adanya kelembagaan unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan. Selain itu akar permasalahan yang banyak dijumpai di Pelabuhan perikanan adalah masih banyak nelayan tidak melakukan bongkar muat di pelabuhan perikanan tetapi di tangkahan masing-masing.



2. Produk Perikanan yang keluar dari Bangka Belitung masih didominasi produk beku dan segar sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Permasalahan ini disebabkan masih minimnya investasi dalam hilirisasi produk perikanan.

3. Masih Terjadinya konflik kepentingan antar sektor contoh sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir;

Permasalahan ini disebabkan antara lain masih berlakunya IUP di wilayah ruang laut untuk budidaya, konservasi maupun penangkapan sehingga secara hukum masih dibolehkan sesuai amanah perda. Selain itu akar permasalahannya adalah Masyarakat masih menganggap timah sebagai primadona, dan eksplorasi dilakukan secara ilegal dikawasan Rawa, Sungai, Laut tanpa memperhatikan tata guna lahan.

4. Masih maraknya kegiatan *illegal unregulated and unreported fishing* di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung;

Permasalahan ini timbul karena Masih belum optimalnya upaya pengawasan SDKP akibat Anggaran, Sarpras dan SDM yang belum tersedia cukup di lapangan. Akar permasalahan itu semua akibat masih banyak pelaku usaha yang berani menggunakan API terlarang walau telah dilakukan sosialisasi.

5. Maraknya budidaya vaname belum didukung oleh peraturan daerah sebagai acuan dalam pengusahaan budidaya vaname sehingga belum memberikan kontribusi langsung pada pendapatan daerah.

Permasalahan yang ada di lapangan belum semua petambak memiliki izin usaha vanamae yang lengkap. Ini semua disebabkan Aturan perizinan yang banyak dan melibatkan berbagai instansi membuat pelaku usaha kesulitan dalam proses pengurusan izin.

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, maka permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelabuhan perikanan sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah	Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan belum optimal dan harus segera di Bangun/Rehabilitasi dan kelembagaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan belum ada	Di kawasan tertentu nelayan tidak melakukan bongka rmuat di pelabuhan perikanan tetapi di tangkahan masing-masing
2.	Produk Perikanan masih didominasi produk beku dan segar sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha	Masih minimnya investasi dalam hilirisasi produk perikanan	
3.	Masih Terjadinya konflik kepentingan antar sektor contoh sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir;	Masih berlakunya IUP di wilayah ruang laut untuk budidaya, konservasi maupun penangkapan sehingga secara hukum masih dibolehkan sesuai amanah perda.	Masyarakat masih menganggap timah sebagai primadona, dan eksplorasi dilakukan secara ilegal dikawasan Rawa, Sungai, Laut tanpa memperhatikan tata guna lahan.
4.	Masih maraknya kegiatan <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung;	Masih belum optimalnya upaya pengawasan SDKP akibat Anggaran, Sarpras dan SDM yang belum tersedia cukup di lapangan	Banyak pelaku usaha yang berani menggunakan API terlarang walau telah dilakukan sosialisasi
5.	Maraknya budidaya vaname belum didukung oleh peraturan daerah sebagai acuan dalam pengusahaan budidaya	Belum semua petambak memiliki izin usaha vanamae yang lengkap	Aturan perizinan yang banyak dan melibatkan berbagai instansi membuat pelaku usaha



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	vaname sehingga belum memberikan kontribusi langsung pada pendapatan daerah		kesulitan dalam proses pengurusan izin

3.2. Telaahan keselarasan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Resntra PD

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan tetap merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Rancangan awal RPD yang disusun oleh tim penyusun RPD yang dikoordinir oleh Bappeda.

Tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah.
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM.
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran sejumlah 20 (dua puluh) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian;
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan;
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian;
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan;
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan;
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestic;
7. Meningkatnya Ekspor;
8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah;
9. Meningkatnya Meningkatnya Pembangunan Manusia;



10. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi;
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur;
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang;
14. Menurunnya Resiko Bencana;
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan;
16. Laju Pertumbuhan Penduduk;
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan;
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja;
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2023-2026 adalah Meningkatnya ekonomi Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan Pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan. Dimana Dinas Kelautan dan perikanan mendukung penuh sasaran RPD dengan menerjemahkan melalui tujuan renstra melalui Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan dengan indicator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan produksi perikanan tangkap;
- b. Meningkatnya Produksi Perikanan Budiaya dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan produksi perikanan budidaya;
- c. Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan;



d. Meningkatnya jenis Jasa Kelautan yang dapat difasilitasi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Jenis Jasa Kelautan yang difasilitasi; Sedangkan untuk tujuan meningkatnya Indeks Reformasi Daerah dengan indicator di intervensi dengan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di terjemahkan dalam tujuan renstra Meningkatkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DKP) dengan sasaran renstra berupa: Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP) Nilai RB Perangkat Daerah (DKP) Meningkatkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DKP) dengan indicator kinerja sasaran Predikat RB Perangkat Daerah (DKP) dengan indikator kinerja sasaran Nilai RB Perangkat Daerah (DKP). Tujuan dan sasaran renstra Dinas Kelautan dan Perikanan telah menerjemahkan apa yang menjadi tujuan sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, dokumen tersebut merupakan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020-2024) dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan urusan yang menjadi



kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, dengan Peta Strategi sebagai berikut:

Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.

Customer Perspective

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 1) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- 2) Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan



- 3) Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024; dan
- 2) luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.

Internal Process Perspective

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja: 1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024; dan 2) kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja:

- 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
- 2) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
- 3) persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja:



- 1) produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
 - 2) produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
 - 3) dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024;
 - 4) kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024.
- Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan indikator kinerja:
- 1) persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
 - 2) persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
 - 3) tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja: 1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan 2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Selain Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan jajarannya merupakan salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan kelautan dan perikanan periode 2023-2026,



faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Renstra Dinas yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang selain penjabaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kondisi lingkungan sekaligus sebagai masukan bagi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam mendorong pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Analisis Renstra K/L dan PD kabupaten/kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan melihat bahwa memang sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat telah mengungkap indikator yang sama. Masing-masing level pemerintah menetapkan target indikator sasarannya dan akan diukur pencapaiannya tiap tahun. Berdasarkan hasil capaian inilah nanti akan ditentukan sasaran yang belum optimal dikerjakan dan usaha apa yang perlu ditempuh untuk memperbaiki keadaan tersebut pada periode renstra 5 tahunan berikutnya.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan Kabupaten/Kota maka dapat ditarik secara garis besar permasalahan yang sama-sama dihadapi dan faktor penghambat serta pendorong penyelesaian permasalahan adalah kurang lebih sama seperti yang disajikan pada sub bab 3.2. di atas. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan tersebut, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap RTRW dan KLHS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bidang pembangunan kelautan dan perikanan maka dapat ditarik secara garis besar permasalahan yang sama-sama dihadapi dan faktor penghambat serta pendorong penyelesaian permasalahan dimaksud. Secara spesifik, telaahan terhadap RTRW dan KLHS ini adalah mengacu pada penyelesaian permasalahan dengan sasaran ke-5 dari RPJMD yang telah dibahas pada sub bab 3.2 di atas.

Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) mengisyaratkan bahwa untuk sektor kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menganut pembangunan dengan pendekatan kawasan. Berdasarkan telaahan terhadap dokumen tersebut didapatkan informasi bahwa untuk sektor kelautan dan perikanan terdapat 5 lokasi pembangunan dengan pendekatan kawasan pembangunan, yaitu:

1. Pengembangan kawasan strategis Minapolitan Lepar Pongok.
2. Pengembangan kawasan strategis Etalase Perikanan Selat Nasik.
3. Pengembangan kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga.
4. Pengembangan kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar.

Keempat kawasan pembangunan ini, nantinya akan dikerjakan tidak hanya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, namun melibatkan antar sektor seperti Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Permukiman, Air Bersih, Koperasi, Tenaga Kerja dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan sudah masuk di dalam dokumen perencanaan RKPD 2023-2026.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas



pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra, dikenal istilah pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness and Growth*). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dari sisi pelayanan perangkat daerah terhadap RPJMD, Renstra KKP dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, RTRW dan KLHS pada Sub Bab 3.2 sampai dengan 3.4, maka didapat 6 permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keenam isu ini kembali akan dibobot dengan metode USG agar diperoleh Isu Strategis yang akan dijawab dalam kurun waktu 4 tahunan periode pembangunan ke depan. Secara lebih lengkap akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.



Tabel. 3.3.

Pembobotan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Kajian

No	Permasalahan	Nilai SkalaBobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	4	5	5	14
2	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing	5	4	5	14
3	Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha	4	5	5	14
4	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor contoh sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir;	5	4	4	13
5	Belum optimalnya pembangunan Kawasan pengembangan khusus kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW	4	4	4	12
6	Masih marak terjadinya <i>illegal unregulated and unreported fishing</i> di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung.	4	5	4	13

Sumber: Sub Koordinator Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 3 permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai **14 poin** yaitu permasalahan nomor 1, 2 dan 3 dengan variasi bobot angka yang berbeda. Jika kita tilik lebih jauh ternyata ketiga permasalahan ini dapat dijadikan satu bahasa yang lebih sederhana dan diangkat menjadi isu strategis, yaitu Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Selanjutnya, terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot yang sama juga dengan nilai **13 poin**, yaitu permasalahan nomor 4 dan nomor 6. Kembali, secara garis besar permasalahan ini dapat lebih disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis berikutnya, yaitu **Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mentaati peraturan**. Terakhir, permasalahan yang memiliki jumlah bobot terendah, yaitu **12 poin** adalah permasalahan nomor 5. Secara lebih sederhana dapat diangkat menjadi isu strategis yang terakhir, yaitu **Masih belum optimalnya pembangunan kelautan dan perikanan**.

Secara berurutan berdasarkan pembobotan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa Isu Strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023-2026 adalah:

1. Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mentaati peraturan.
3. Masih belum optimalnya pembangunan kelautan dan perikanan.



BAB IV

Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indicator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026.**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Renstra									
			Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-				Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4			1	2	3	4
1.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	4,9	5,0	5,1	5,2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Laju Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	1,27%	1,30%	1,35%	1,40%
							Meningkatnya Produksi Perikanan Budiaya	Laju Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	3,00%	3,50%	4,00%	4,5%
							Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan	Laju Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan	1,36%	1,78%	2,19%	2,57%
							Meningkatnya jenis Jasa Kelautan yang dapat difasilitasi (jenis)	Persentase Jenis Jasa Kelautan yang difasilitasi	17%	25%	33%	42%
2	Meningkatkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DKP)	Predikat RB Perangkat Daerah (DKP)	21,5	21,8	22	22,3	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DKP)	70	73	75	78



4.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Tujuan dan Sasaran RPD.

Berdasarkan uraian atas tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan di atas serta tujuan dan sasaran dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dapat ditarik satu garis yang linear antara keduanya. Secara lebih jelas akan digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas.

No	RPD				RENSTRA			
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Laju Pertumbuhan produksi perikanan tangkap
							Meningkatnya Produksi Perikanan Budiaya	Laju Pertumbuhan produksi perikanan budidaya
							Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan	Laju Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan
							Meningkatnya jenis Jasa Kelautan yang dapat difasilitasi	Persentase Jenis Jasa Kelautan yang difasilitasi
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DKP)	Predikat RB Perangkat Daerah (DKP)	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DKP)



BAB V

Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah haruslah tepat mewujudkan sasaran, sehingga sasaran yang dicapai juga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran dapat dicapai. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga haruslah tepat dan konsisten dengan sasaran dan tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan aturan hukum kaidah-kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam RPD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

5.1 Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan

Strategi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga sebagai RENCANA



STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dasar untuk menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2023-2026. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Pengembangan produksi pengolahan hasil perikanan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan;
2. Peningkatan kapasitas SDM Pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan Produktifitas, Kualitas/Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan;
3. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta kegiatan usaha kelautan dan perikanan s.d 12 Mil;
4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk penguatan reformasi birokrasi internal perangkat daerah.

Untuk melihat lebih jelas keterkaitan dan konsistensi antara strategi dengan sasaran dan tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.1 Hubungan Tujuan Sasaran dan Strategi
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan		Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budiaya 3. Meningkatnya Produksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Pengembangan produksi pengolahan hasil perikanan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan 2. Peningkatan kapasitas SDM Pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka



Tujuan		Sasaran	Strategi
		pengolahan hasil perikanan	meningkatkan Produktifitas, Kualitas/Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan
		4. Meningkatnya jumlah Jasa Kelautan yang dapat difasilitasi (lokasi)	3. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta kegiatan usaha kelautan dan perikanan s.d 12 Mil
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah	5. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP)	4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk penguatan reformasi birokrasi internal perangkat daerah

Sumber: Sub Koordinator Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5.2 Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan keberhasilannya dalam implementasi haruslah didukung oleh arah kebijakan yang tepat dan memadai, agar pencapaian sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, dapat terjamin realisasinya. Oleh karena itu setiap strategi yang ada harus dikuatkan dan didukung oleh arah kebijakan yang tepat serta memadai. Keterkaitan dan konsistensi antara arah kebijakan dengan strategi, sasaran, dan tujuan diuraikan dalam berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan.	1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap.	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Pengembangan produksi pengolahan	1. Peningkatan sarana pra-sarana produksi perikanan tangkap. perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil



Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budiaya.	hasil perikanan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.	perikanan dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan daerah.
		3. Meningkatnya Produksi pengolahan hasil perikanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM Pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan Produktifitas, Kualitas/Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan.	2. Meningkatkan pengembangan kapasitas SDM Pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan Produktifitas, Kualitas/Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan.
		4. Meningkatnya jumlah Jasa Kelautan yang dapat difasilitasi (lokasi).	3. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta kegiatan usaha kelautan dan perikanan s.d 12 Mil.	3. Pengembangan SDM, Sarana dan prasarana dalam rangka membina, Mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta kegiatan usaha kelautan dan perikanan s.d 12 Mil.
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah .	5. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP).	4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk penguatan reformasi birokrasi internal perangkat daerah.	4. Pengembangan, Penerapan/Pelaksanaan dan, Evaluasi Prosedur Standar Operasional Pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada pelaku usaha kelautan dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perikanan serta masyarakat umumnya.

Sumber: Sub Koordinator Perencanaan Dinas KELautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan keempat arah kebijakan DKP tersebut perlu didukung penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan DKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP DKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama. Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun juga dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha DAerah. Peningkatan penerimaan PAD pada periode tahun 2017-2022 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2023-2026. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023-2026, meliputi:

1. Tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Gender;
3. Tematik



4. Inovasi.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP tersebut mengacu pada RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (Life Below Water) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- c. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- d. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- e. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;

2. Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan



perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. DKP telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang mencakup:

- a. penguatan tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penyiapan roadmap PUG sector Kelautan dan Perikanan;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit kerja eselon II di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG DKP.

DKP terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan PUG. PUG diharapkan mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya yang partisipatif.

Beberapa program dan kegiatan responsif gender diantaranya adalah Pelayanan Perizinan, Pengawasan kepada pelaku usahabimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus, bantuan paket usaha perikanan budidaya, alih teknologi hasil riset pengolahan, dan pemanfaatan hasil perikanan.

3. Tematik



Penyusunan Tematik dilakukan dalam rangka melihat program kegiatan dan sub kegiatan mana saja yang mendukung sasaran RPD. Dari 19 Sararan RPD Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung 4 sasaran antara lain:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan;
 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur;
 4. Menurunkan Tingkat Kemiskinan;
4. Inovasi

Pengarusutamaan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Inovasi yang dilakukan merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing daerah dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Strategi pengarusutamaan inovasi terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup DKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE DKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (on-line), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.



BAB VI

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan ditampilkan di dalam tabel di bawah ini. Secara umum dapat dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan 6 program untuk kurun waktu 2023-2026, dengan penjelasan 1 program bersifat rutin dan 5 program bersifat mendukung langsung pencapaian sasaran di dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023-2026.

Tabel ini menggambarkan juga besaran indikator untuk tiap-tiap program yang diusulkan, bahkan sampai dengan level kegiatan beserta pagu dana indikatif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan tersebut. Seluruh program dan kegiatan ini ditujukan sebagai upaya nyata mewujudkan pelaksanaan program di Bidang Kelautan dan Perikanan di masa pemerintahan 2023-2026 mendatang.

Pada penyusunan Renstra 2023-2026 penggunaan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 yang telah diperbaharui dengan Kepmendagri 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pada Kepmendagri 050-5889/2021 telah disusun sampai indikator Sub kegiatan sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja dan menyamakan persepsi atas indikator sub kegiatan yang ada.

Pada Renstra 2023-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan mengampu 6 Program yakni:

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.



6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi sebagai program rutin operasional dinas.

Secara lebih detail akan ditampilkan dalam tabel 6.1 di bawah ini.



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kep. Babel
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Loka si		
								Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			targ et	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya ekonomi Daerah	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Laju Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	3	2	0																
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap														
										235650											
										15.245.000.000	238.713	15.814.250.000	241.936	16.082.000.000	245.323	17.020.700.000	245.323	17.020.700.000			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3201	Kegiatan Pengelolaan dan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	Jumlah sarana dan Prasaran Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	243	4.391.349.430	765	7.150.000.000	865	7.650.000.000	965	8.150.000.000	1.015	9.150.000.000	1.015	9.150.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			32015303	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	0	0	200	65.000.000	250	75.000.000	300	100.000.000	350	120.000.000	350	120.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			3 2 0 5 3 0 4	1 0 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Berukuran sampai 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	0	0	100	50.000.000	150	65.000.000	200	75.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			32015307	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	0	0	0	-	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-		



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Loka si		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Penerbitan Izin	Meningkatnya	0	0	-	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			5	3	0	8	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			32015309	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		0	250	140.000.000	300	120.000.000	350	130.000.000	400	150.000.000	400	150.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			320105310	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Buku Perikanan (BKP) yang berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	0	0	101	140.000.000	125	100.000.000	150	125.000.000	175	150.000.000	175	150.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
					dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan dan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7	2.623.047.992	7	7.700.000.000	7	7.744.250.000	7	7.502.000.000	7	7.350.700.000	7	7.350.700.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Persentase Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi di PPP Muara Sungai Baturusa (%)			-	60	1.200.000	70	1.300.000	80	1.400.000	80	1.400.000			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
								Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan dan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa				-	7	1.200.000.000	7	1.300.000.000	7	1.400.000.000	7	1.400.000.000		
			3	2	0	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	77	430.450.316	70	1.475.000.000	73	1.800.000.000	76	2.125.000.000	80	2.450.000.000	80	2.450.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	115	430.450.316	50	1.475.000.000	55	1.800.000.000	60	2.125.000.000	65	2.450.000.000	65	2.450.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budiay	Laju Pertumbuhan produksi perikanan	3	2	0	5	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				5.329.800.000		5.294.800.000		6.804.800.000		5.789.800.000	-	5.789.800.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
		budidaya																	
					Volume produksi perikanan budidaya			15.000	2.450.000.000	15.525	2.220.000.000	16.146	3.550.000.000	16.873	2.360.000.000	16.873	2.360.000.000		
			3201	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan budidaya lintas Kab/Kota dalam 1 daerah	0	-	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Loka si		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			targ et	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							(satu) Daerah Provinsi	Provinsi yang diterbitk an														
			3	2	0	1	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomen dasi TDPIK di laut dan Lintas Kab/Kot a dalam 1 daerah Provinsi yang diterbitk an	0	-	6	250.000. 000	6	250.000. 000	6	250.000. 000	6	250.000. 000	6	250.000. 000	DKP	Provi nsi Kepu lauan Bang ka Belit ung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi hasil budidaya laut dan payau dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)	13120	352.835.056	10.750	1.550.000.000	11.288	1.320.000.000	11.852	2.650.000.000	12.444	1.460.000.000	12.444	1.460.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	2	0	1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah produksi hasil budidaya tawar dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)	0	-	1.300	400.000.000	1.365	400.000.000	1.433	400.000.000	1.504	400.000.000	1.504	400.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							=			10,5	2.879.800.000	11	3.074.800.000	12	3.254.800.000	12	3.429.800.000	12	3.429.800.000			
			3	2	0	1	Pengelolaan Pe mbudayaan Ikan Di Laut	Jumlah Sarana Prasaran a Balai Benih Air Laut yang di Adakan	5	1.076.013.163	1	1.427.800.000	1	1.502.800.000	1	1.577.800.000	1	1.652.800.000	1	1.652.800.000	DKP	Provi nsi Kepu lauan Bang ka Belit ung
								Jumlah Sarana Prasaran a Balai Benih Air Payau	0	-	1	1.452.000.000	1	1.572.000.000	1	1.677.000.000	1	1.777.000.000	1	1.777.000.000	DKP	Provi nsi Kepu lauan Bang ka



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
																						Belitung
																		-	-			
			3	2	0		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)			70	250.000.000	73	325.000.000	76	375.000.000	80	420.000.000	80	420.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	0	2	50.000.000	4	75.000.000	6	100.000.000	8	120.000.000	8	120.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina		0	1		2		3		4		4		DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1	0	10	200.000.000	12	250.000.000	14	275.000.000	16	300.000.000	16	300.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Loka si		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							(satu) Daerah Provinsi yang Diawasi															
	Meningkatnya Produksi pengolahan hasil	Laju Pertumbuhan produksi pengolahan hasil	3	2	0		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				1.400.00 0.000		1.140.00 0.000		1.280.00 0.000		1.420.00 0.000		-	1.420.00 0.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
	perikanan	perikanan																				
							Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan			22410	1.300.000.000	22.810	940.000.000	23.310	980.000.000	23.910	1.020.000.000	23.910	1.020.000.000			
			3	2	0	1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1		9	850.000.000	6	550.000.000	6	550.000.000	6	550.000.000	6	550.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Loka si		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			targ et	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							(satu) Daerah Provinsi (rekomendasi)															
			3	2	0	1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha skala menengah besar yang dibina terkait mutu dan keamana			20	150.000. 000	20	170.000. 000	22	190.000. 000	22	210.000. 000	22	210.000. 000	DKP	Provi nsi Kepu lauan Bang ka Belit ung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							n hasil perikannya															
			3	2	0	1	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pemetaan dan pemantauan yang tersusun			3	300.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Tersedianya data informasi pasar produk hasil perikanan (laporan)			12		12		12		12		12		DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
					Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)			85%	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Loka si		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan			80	100.000. 000	82	200.000. 000	85	300.000. 000	90	400.000. 000	90	400.000. 000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Jml sampel yg diujidim rangka pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan utk menghasilkan produk yg aman utk dikonsumsi	750	29.996.826	300		400		500		600		600		DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
								Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			3	2	0		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)			70	150.000.000	73	200.000.000	76	250.000.000	80	300.000.000	80	300.000.000		
			3	2	0	1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya			25	150.000.000	28	200.000.000	30	250.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
				(Satu) Daerah Provinsi	yang Dapat Diusaha kan Lintas Kabupat en/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diawasi														
								3	5	7	9					-	-		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Meningkatnya jenis Jasa Kelautan yang dapat difasilitasi (jenis)	Jenis Jasa Kelautan yang difasilitasi	3	2	0		Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			24	2.600.000,00	25	2.800.000,00	25	3.200.000,00	27	3.750.000,00	27	3.750.000,00		
			3	2	0	1	Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar	luasan ruang laut yang dikelola			516140,93	1.150.000,00	523.513	1.050.000,00	534.871	1.150.000,00	627.613	1.350.000,00	627.613	1.350.000,00	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							minyak dan gas bumi															ka Belitung
			3	2	0	1	Penerbitan Rekomendasi Izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	diterbitkan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi			24	700.000.000	25	750.000.000	26	800.000.000	27	900.000.000	27	900.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	kelompok masyarakat yang diberdayakan			3	750.000.000	4	1.000.000.000	5	1.250.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	2	0		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)			70	100.000.000	73	125.000.000	76	150.000.000	80	175.000.000	80	175.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)	0	0	10	100.000.000	12	125.000.000	14	150.000.000	16	175.000.000	16	175.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
							Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai		0	0	2		4		6		8		8		DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							Dengan 12 Mil yang Dibina (Pelaku Usaha)															
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DKP)	3	2	0	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			21.899.480.000		22.270.680.000		22.028.140.000		23.349.206.000	-	23.349.206.000			
							Nilai SAKIP Perangkat DAerah			79	450.000.000	79,5	490.000.000	80	510.000.000	80,5	540.000.000	81	540.000.000			



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Loka si		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			targ et	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, pengang garan dan Evaluasi Perangk at Daerah (DKP)	10	692274 05	10	450.000. 000	10	490.000. 000	10	510.000. 000	10	540.000. 000	10	540.000. 000	DKP	Provi nsi Kepu luan Bang ka Belit ung
							Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKP)		##### #####	83	19.070.9 80.000	84	19.373.1 80.000	85	19.046.1 40.000	86	19.703.6 06.000	86	19.703.6 06.000			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan keuangan (DKP)	95	12993693915	83	14.790.000.000	84	14.900.000.000	85	15.010.000.000	86	15.120.000.000	86	15.120.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	2	0	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan peraturan			2	191.000.000	2	236.000.000	2	246.000.000	2	246.000.000	2	246.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	2	0	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan	0	0	83	172.280.000	84	190.380.000	85	140.530.000	86	145.935.000	86	145.935.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							kepegawaian (DKP)															ka Belitung
			3	2	0	1	Administrasi Umum Perangkat (DKP) Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (DKP)	Indeks Kepuasan Pelayana	100	246385201	1	616.000.000	1	655.100.000	1	695.610.000	1	762.671.000	1	762.671.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	2	0	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah			27	1.095.000.000	24	1.185.000.000	28	720.000.000	27	1.195.000.000	27	1.195.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							Pemerintah Daerah (DKP)	ah yang diadakan (DKP)														Belitung
			3	2	0	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DKP)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DKP)			4	1.001.700.000	4	1.001.700.000	4	1.029.000.000	4	1.029.000.000	4	1.029.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3201	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DKP)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di pelihara (DKP)			123	1.205.000.000	123	1.205.000.000	123	1.205.000.000	123	1.205.000.000	123	1.205.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			325		Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-BPI)		575411462	83	1.939.500.000	84	1.835.250.000	85	1.946.500.000	86	2.276.800.000	86	2.276.800.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPI)	Indeks Kepuasan Pelayanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPI)	100	931714	83										DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	2	0	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI)	0	0	5	1.134.000.000	5	1.046.000.000	6	1.098.000.000	6	1.360.000.000	6	1.360.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							diadakan (UPTD BPI)															
			3	2	0	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI)	1	331530000	10	435.500.000	10	465.000.000	10	488.000.000	10	511.000.000	10	511.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2	0	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI)	Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (UPTD BPI)	1	150710000	6	169.000.000	6	106.000.000	6	128.000.000	6	155.000.000	6	155.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	2	0		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-LPPMH P)			83	439.000.000	84	572.250.000	85	525.500.000	86	828.800.000	86	828.800.000			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							Daerah (UPTD LPPMH P)															
			3	2	0	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD LPPMHP)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD LPPMHP) Pemerintah Yang di pelihara (UPTD LPPMH P)	1	39732178	1	32.000.000	1	42.500.000	1	53.000.000	1	63.500.000	1	63.500.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3	2				Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-BPI)					84	1.635.000.000	85	1.769.500.000	86	1.808.800.000	86	1.808.800.000		
			3	2	0	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Muara Sungai baturusa)	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD-PPP Muara					84	97.500.000	85	104.000.000	86	110.300.000	86	110.300.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			3	2	0	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Muara Sungai baturusa)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Muara Sungai baturusa) yang diadakan (UPTD-PPP Muara Sungai				5	930.000.000	6	1.030.000.000	6	1.020.000.000	6	1.020.000.000	6	1.020.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
							baturusa)															
			3	2	0	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Muara Sungai baturusa)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD-PPP Muara Sungai				10	510.000.000	10	523.000.000	10	536.000.000	10	536.000.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
									Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)	
							baturusa)																
			3	2	0	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Muara Sungai baturusa)	Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (UPTD-PPP Muara Sungai				6	97.500.000	6	112.500.000	6	142.500.000	6	142.500.000	6	142.500.000	DKP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					baturusa)															
TOTAL PAGU INDIKATIF DKP									48.449.2 80.000		52.604.7 30.000		55.364.4 40.000		57.883.5 06.000		57.883.5 06.000			



BAB VII

Indikator Kinerja Pd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Secara terperinci disajikan pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2022	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0
A.	Volume produksi perikanan tangkap (ton)	-	235.650,0	238.713,0	241.936,0	245.323,0	245.323,0
1	Jumlah sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	765,0	865,0	965,0	1.015,0	1.015,0
2	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	200,0	250,0	300,0	350,0	350,0
3	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Berukuran sampai 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	-	100,0	150,0	200,0	250,0	250,0
4	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-	1,0	-	-	-
5	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-	1,0	-	-	1,0



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2022	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0
6	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	250,0	300,0	350,0	400,0	400,0
7	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	101,0	125,0	150,0	175,0	175,0
8	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Bangka Belitung	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
B	Persentase Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi di PPP Muara Sungai Baturusa (%)	-	-	60	70	80	80
	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
C.	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	-	70,0	73,0	76,0	80,0	80,0
1	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)	-	50,0	55,0	60,0	65,0	65,0
D.	Volume produksi perikanan budidaya (ton)	-	15.000,0	15.525,0	16.146,0	16.873,0	16.873,0
1	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan budidaya lintas Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi yang diterbitkan	-	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2	Jumlah rekomendasi TDPIK di laut dan Lintas Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi yang diterbitkan	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3	Jumlah produksi hasil budidaya laut dan payau dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)	-	10.750,0	11.288,0	11.852,0	12.444,0	12.444,0
4	Jumlah produksi hasil budidaya tawar dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)	-	1.300,0	1.365,0	1.433,3	1.504,0	1.504,0
E.	Jumlah Benih yang diproduksi (juta ekor)	-	10,5	11,0	11,5	12,0	12,0
1	Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih Air Laut yang di Adakan	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih Air Payau dan Air Tawar yang di Adakan	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
							-
F.	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	-	70,0	73,0	76,0	80,0	80,0
1	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)	-	2,0	4,0	6,0	8,0	8,0
2	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	-	1,0	2,0	3,0	4,0	4,0



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2022	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0
3	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diawasi	-	10,0	12,0	14,0	16,0	16,0
G.	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	-	22.410,0	22.810,0	23.310,0	23.910,0	23.910,0
1	Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (rekomendasi)	-	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Jumlah unit usaha skala menengah besar yang dibina terkait mutu dan keamanan hasil perikananannya	-	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0
3	Jumlah dokumen pemetaan dan pemantauan yang tersusun	-	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Tersedianya data informasi pasar produk hasil perikanan (laporan)	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
H.	Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan	-	80,0	82,0	85,0	90,0	90,0
2	Jml sampel yg diuji dlm rangka pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan utk menghasilkan produk yg aman utk dikonsumsi	-	300,0	400,0	500,0	600,0	600,0
I.	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	-	70,0	73,0	76,0	80,0	80,0
1	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diawasi	-	25,0	28,0	30,0	35,0	35,0
J.	lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung	-	24,0	25,0	25,0	27,0	27,0
1	luasan ruang laut yang dikelola	-	516.140,9	523.513,4	534.871,1	627.612,9	627.612,9
2	diterbitnya rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi	-	24,0	25,0	26,0	27,0	27,0
3	kelompok masyarakat yang diberdayakan	-	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0
K.	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	-	70,0	73,0	76,0	80,0	80,0
1	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)	-	10,0	12,0	14,0	16,0	16,0
2	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Dibina (Pelaku Usaha)	-	2,0	4,0	6,0	8,0	8,0
L.							



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2022	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0
	Nilai SAKIP Perangat Daerah (DKP)	-	79,0	79,5	80,0	80,5	80,5
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (DKP)	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
M	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKP)	-	83,0	84,0	85,0	86,0	86,0
1	Indeks kepuasan pelayanan keuangan (DKP)	-	83,0	84,0	85,0	86,0	86,0
2	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan peraturan	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian (DKP)	-	83,0	84,0	85,0	86,0	86,0
4	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminstras Umum Perangkat Daerah (DKP)	-	83,0	84,0	85,0	86,0	86,0
5	Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah yang diadakan (DKP)	-	27,0	24,0	28,0	27,0	27,0
6	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DKP)	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (DKP)	-	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
N	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-BPI)	-	83,0	84,0	85,0	86,0	86,0
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPI)	-	83,0	84,0	85,0	86,0	86,0
2	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD BPI)	-	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0
3	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI)	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Penerimaan Daerah Yang di pelihara (UPTD BPI)	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
O	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-LPPMHP)	-	83,0	84,0	85,0	86,0	86,0
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD LPPMHP)	-	83,0	84,0	85,0	86,0	86,0
2	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD LPPMHP)	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang di pelihara (UPTD LPPMHP)	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
P	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-PPP Muara Sungai baturusa)	-	-	84,0	85,0	86,0	86,0
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD-PPP Muara Sungai baturusa)	-	-	84,0	85,0	86,0	86,0
2	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD-PPP Muara Sungai baturusa)	-	-	5,0	6,0	6,0	6,0



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		Tahun 2022	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4		
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	
3	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD-PPP Muara Sungai baturusa)	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	
4	Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (UPTD-PPP Muara Sungai baturusa)	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	



BAB VIII

Penutup

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 -2026 mengkomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama empat tahun RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Strategis 2023 – 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping itu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam empat tahun kedepan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjalankan 6 Program dengan 13 Indikator Kinerja Program (outcome) dengan total pagu anggaran Rp.214.301.956.000,00.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan akan dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala pada tiap tahunnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perencanaan 2023-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Dr. Drs. Agus Suryadi, MSi
Pembina Utama Muda
NIP 197308091993031002

LAMPIRAN

BA

**Verifikasi
Renstra
Perangkat
Daerah**

b.	14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang	14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan								
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	235.650	150.000.000	238.713	#REF!	241.936	150.000.000	245.323	150.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	Jumlah sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	765	150.000.000	865	150.000.000	965	150.000.000	1.015	150.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
c.	14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya	4.4.1 Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman								

e.	14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)	14.6.1. Persentase kepatuhan pelaku usaha								
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	70	1.975.000.000	73	2.450.000.000	76	2.900.000.000	80	3.345.000.000
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)	62	1.500.000.000	71	1.850.000.000	80	2.200.000.000	89	2.545.000.000
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000		175.000.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1	1.250.000.000	1	1.500.000.000	1	1.750.000.000	1	2.000.000.000

	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	30	100.000.000	32	150.000.000	34	200.000.000	35	250.000.000
		Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	23	125.000.000	29	150.000.000	33	175.000.000	38	200.000.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	25	350.000.000	28	450.000.000	30	525.000.000	35	600.000.000
		Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	3		5		7		9	

	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000

*) jika tidak ada, dikolom dikasih keterangan== tidak ada===

Program/Kegiatan yang mendukung Tematik

No.	Sasaran/Program /Kegiatan	Indikator	Target							
			2023		2024		2025		2026	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan									
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	235.650	15.245.000.000	238.713	18.770.000.000	241.936	19.280.000.000	245.323	20.370.000.000

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	Jumlah sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	765	7.150.000.000	865	7.650.000.000	965	8.150.000.000	1.015	9.150.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	750	2.000.000.000	850	2.500.000.000	950	3.000.000.000	1.000	4.000.000.000
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	50.000.000	150	65.000.000	200	75.000.000	250	100.000.000

	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang di terbitkan	100	50.000.000	150	65.000.000	200	75.000.000	250	100.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Berukuran sampai 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	200	65.000.000	250	75.000.000	300	100.000.000	350	120.000.000
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang di terbitkan	200	65.000.000	250	75.000.000	300	100.000.000	350	120.000.000
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	0	-	1	30.000.000	-	-	-	-
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	1	30.000.000				

Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	0	-	1	30.000.000	-	-	-	-
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	1	30.000.000				
Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	250	140.000.000	300	120.000.000	350	130.000.000	400	150.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	40.000.000	-	-	0	-	0	-

Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	250	100.000.000	300	120.000.000	350	130.000.000	400	150.000.000
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	101	140.000.000	125	100.000.000	150	125.000.000	175	150.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	40.000.000						
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	100	100.000.000	125	100.000.000	150	125.000.000	175	150.000.000

	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7	7.700.000.000	7	10.700.000.000	7	10.700.000.000	7	10.700.000.000
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Lokasi	200.000.000	1 Lokasi	200.000.000	1 Lokasi	200.000.000	1 Lokasi	200.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Pelabuhan	5.000.000.000	7 Pelabuhan	8.000.000.000	7 Pelabuhan	8.000.000.000	Pelabuhan	8.000.000.000
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintah dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	7 Pelabuhan	2.500.000.000	7 Pelabuhan	2.500.000.000	7 Pelabuhan	2.500.000.000	Pelabuhan	2.500.000.000
		Persentase Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi di PPP Muara Sungai Baturusa (%)		-	60	1.200.000.000	70	1.300.000.000	80	1.400.000.000
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa	7	-	7	1.200.000.000	7	1.300.000.000	7	1.400.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia			7 Pelabuhan	700.000.000	7 Pelabuhan	800.000.000	Pelabuhan	900.000.000

	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintah dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			7 Pelabuhan	500.000.000	7 Pelabuhan	500.000.000	Pelabuhan	500.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi		5.329.800.000		5.294.800.000		6.804.800.000		5.789.800.000
			15.000	2.450.000.000	15.525	2.220.000.000	16.146	3.550.000.000	16.873	2.360.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan budidaya lintas Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi yang diterbitkan	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko yang tersusun	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi TDPIK di laut dan Lintas Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi yang diterbitkan	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi hasil budidaya laut dan payau dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)	10.750	1.550.000.000	11.288	1.320.000.000	11.852	2.650.000.000	12.444	1.460.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	4	500.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000

	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	1	100.000.000	1	120.000.000	1	1.400.000.000	1	160.000.000
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia	2	150.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya yang dibina	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000
	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	0	-	-	-	-	-	-	-

Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20	100.000.000	20	110.000.000	20	120.000.000	20	130.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah produksi hasil budidaya tawar dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)	1.300	400.000.000	1.365	400.000.000	1.433	400.000.000	1.504	400.000.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	10,5	2.879.800.000	11	3.074.800.000	11.5	3.254.800.000	12	3.429.800.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih Air Laut yang di Adakan	1	1.427.800.000	1	1.502.800.000	1	1.577.800.000	1	1.652.800.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1	750.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000	1	900.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2	677.800.000	2	702.800.000	2	727.800.000	2	752.800.000

		Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih Air Payau dan Air Tawar yang di Adakan	1	1.452.000.000	1	1.572.000.000	1	1.677.000.000	1	1.777.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten Kota	1	900.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	552.000.000	1	572.000.000	1	577.000.000	1	577.000.000
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			1.400.000.000		1.140.000.000		1.280.000.000		1.420.000.000
		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	22.410,00	1.300.000.000	22.810	940.000.000	23.310	980.000.000	23.910	1.020.000.000

	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (rekomendasi)	9	850.000.000	6	550.000.000	6	550.000.000	6	550.000.000
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi yang telah diterbitkan	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang telah diterbitkan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko yang tersusun	5	500.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha skala menengah besar yang dibina terkait mutu dan keamanan hasil perikanannya	20	150.000.000	20	170.000.000	22	190.000.000	22	210.000.000
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10	75.000.000	10	85.000.000	11	95.000.000	11	105.000.000

	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10	75.000.000	10	85.000.000	11	95.000.000	11	105.000.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pemetaan dan pemantauan yang tersusun	3	300.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000
		Tersedianya data informasi pasar produk hasil perikanan (laporan)	12		12		12		12	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersusun	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000

	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	2	200.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000
		Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)	85%	100.000.000	87%	200.000.000	88%	300.000.000	90%	400.000.000
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan	80	100.000.000	82	200.000.000	85	300.000.000	90	400.000.000
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing (UPTD LPPMHP)	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	12	50.000.000	18	140.000.000	24	230.000.000	30	320.000.000

		Jml sampel yg diuji dlm rangka pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan utk menghasilkan produk yg aman utk dikonsumsi	300		400		500		600	
		Jml sampel produk hasil perikanan yg diuji dlm rangka pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan utk menghasilkan produk yg aman utk dikonsumsi	300	50.000.000	400	60.000.000	500	70.000.000	600	80.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	70	1.975.000.000	73	2.450.000.000	76	2.900.000.000	80	3.345.000.000
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang Diawasi (Pelaku Usaha)	62	1.500.000.000	71	1.850.000.000	80	2.200.000.000	89	2.545.000.000
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000		175.000.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1	1.250.000.000	1	1.500.000.000	1	1.750.000.000	1	2.000.000.000

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	30	100.000.000	32	150.000.000	34	200.000.000	35	250.000.000
	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	23	125.000.000	29	150.000.000	33	175.000.000	38	200.000.000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	25	350.000.000	28	450.000.000	30	525.000.000	35	600.000.000
	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	3		5		7		9	

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000
Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung	24	2.600.000.000	25	2.800.000.000	25	3.200.000.000	27	3.750.000.000
Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	luasan ruang laut yang dikelola	516140,93	1.150.000.000	523.513	1.050.000.000	534.871	1.150.000.000	627.613	1.350.000.000
pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat	luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola	516.140,93	600.000.000	523.513	700.000.000	534.871	800.000.000	627.613	900.000.000

mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	12	550.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	450.000.000
Penerbitan Izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	diterbitnya rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi	24	700.000.000	25	750.000.000	26	800.000.000	27	900.000.000
penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Diterbitkannya rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi	24	350.000.000	25	375.000.000	26	400.000.000	27	450.000.000
pencatatan dan pengadministrasian izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut	tercatatnya izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut	24	350.000.000	25	375.000.000	26	400.000.000	27	450.000.000
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	kelompok masyarakat yang diberdayakan	3	750.000.000	4	1.000.000.000	5	1.250.000.000	6	1.500.000.000
pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	meningkatnya kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3	300.000.000	4	400.000.000	5	500.000.000	6	600.000.000

	pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	terpenuhi pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	3	450.000.000	4	600.000.000	5	750.000.000	6	900.000.000
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			21.899.480.000		22.270.680.000		22.028.140.000		23.349.206.000
a		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DKP)	79,00	450.000.000	79,50	490.000.000	80,00	510.000.000	80,50	540.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (DKP)	10	450.000.000	10	490.000.000	10	510.000.000	10	540.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	350.000.000	6	370.000.000	6	380.000.000	6	400.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	100.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKP)	83,00	19.070.980.000	84,00	19.373.180.000	85,00	19.046.140.000	86,00	19.703.606.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan keuangan (DKP)	83	14.790.000.000	84	14.900.000.000	85	15.010.000.000	86	15.120.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	14.500.000.000	100	14.600.000.000	100	14.700.000.000	100	14.800.000.000

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500	30.000.000	550	30.000.000	600	30.000.000	650	30.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	30.000.000	550	30.000.000	600	30.000.000	650	30.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	20.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	50.000.000	10	55.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan peraturan	2	191.000.000	2	236.000.000	2	246.000.000	2	246.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	50.000.000	10	70.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2	50.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000
Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10	45.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian (DKP)	83,00	172.280.000	84,00	190.380.000	85,00	140.530.000	86,00	145.935.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	96	44.800.000	96	57.600.000	-	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	5.000.000	3	5.500.000	3	6.050.000	3	6.655.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi pepegawaian	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	24	72.480.000	24	77.280.000	24	84.480.000	24	89.280.000

Administrasi Umum Perangkat (DKP)	Indeks Kepuasan Pelayanan Administras Umum Perangkat Daerah (DKP)	83	616.000.000	84	655.100.000	85	695.610.000	86	762.671.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	2	14.641.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	4	29.282.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	11.000.000	4	12.100.000	4	13.310.000	4	14.641.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	6.000.000	3	6.600.000	3	7.260.000	3	7.986.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	60.000.000	2	66.000.000	2	72.600.000	2	79.860.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	6.000.000	7	6.600.000	7	7.260.000	7	7.986.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	250.000.000	4	275.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	25.000.000	7	27.500.000	7	30.250.000	7	33.275.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DKP)	Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah yang diadakan (DKP)	27	1.095.000.000	24	1.185.000.000	28	720.000.000	27	1.195.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	450.000.000	1	350.000.000	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	2	600.000.000
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	2	75.000.000	-	-
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	-	2	50.000.000	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	120.000.000	1	500.000.000	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	80.000.000	4	60.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7	45.000.000	7	45.000.000	7	45.000.000	7	45.000.000

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	150.000.000	5	250.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DKP)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DKP)	4	1.001.700.000	4	1.001.700.000	4	1.029.000.000	4	1.029.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	791.700.000	12	791.700.000	12	819.000.000	12	819.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DKP)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (DKP)	123	1.205.000.000	123	1.205.000.000	123	1.205.000.000	123	1.205.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45	300.000.000	45	300.000.000	45	300.000.000	45	300.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	250.000.000	45	250.000.000	45	250.000.000	45	250.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	55.000.000	30	55.000.000	30	55.000.000	30	55.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-BPI)	83,00	1.939.500.000	84,00	1.835.250.000	85,00	1.946.500.000	86,00	2.276.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPI)	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPI)	83	201.000.000	84	218.250.000	85	232.500.000	86	250.800.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4.000.000	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	25.000.000	20	27.000.000	20	28.000.000	20	30.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	5.000.000	30	6.000.000	35	6.000.000	40	8.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80	4.000.000	85	4.250.000	90	4.500.000	96	4.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	150.000.000	20	160.000.000	20	170.000.000	20	180.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPI)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD BPI)	5	1.134.000.000	5	1.046.000.000	6	1.098.000.000	6	1.360.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	100.000.000	-	-	1	50.000.000	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI)	10	435.500.000	10	465.000.000	10	488.000.000	10	511.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	240.000.000	3	260.000.000	3	280.000.000	3	300.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.000.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	12.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	188.500.000	5	195.000.000	5	195.000.000	5	195.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPI)	Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (UPTD BPI)	6	169.000.000	6	106.000.000	6	128.000.000	6	155.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000
	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-LPPMHP)	83,00	439.000.000	84,00	572.250.000	85,00	525.500.000	86,00	828.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD LPPMHP)	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD LPPMHP)	83	97.000.000	84	116.250.000	85	135.500.000	86	146.800.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	6.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	4	6.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	20	35.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	40	6.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80	4.000.000	85	4.250.000	90	4.500.000	96	4.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	20	80.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD LPPMHP)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD LPPMHP)	1	310.000.000	1	413.500.000	1	337.000.000	1	618.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	100.000.000	3	150.000.000	3	20.000.000	3	250.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.000.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	12.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	200.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD LPPMHP)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang di pelihara (UPTD LPPMHP)	1	32.000.000	1	42.500.000	1	53.000.000	1	63.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000
	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-PPMSB)	-	-	84,00	1.635.000.000	85,00	1.769.500.000	86,00	1.808.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD-PPMSB)	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD-PPMSB)	0	-	84	97.500.000	85	104.000.000	86	110.300.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			20	20.000.000	20	23.000.000	20	25.000.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			30	2.500.000	35	2.500.000	40	2.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			85	4.000.000	90	4.500.000	96	4.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD-PPMSB)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan(UPTD-PPMSB)	5	-	5	930.000.000	6	1.030.000.000	6	1.020.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	300.000.000	-	400.000.000	1	400.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	20.000.000	1	20.000.000	-	-

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD-PPPMSB)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD-PPPMSB)	10	-	10	510.000.000	10	523.000.000	10	536.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3	100.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	7.500.000	1	10.000.000	1	12.500.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD-PPMSB)	Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (UPTD-PPMSB)			6	97.500.000	6	112.500.000	6	142.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000
3.	Menurunkan Tingkat Kemiskinan									
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	235.650	7.000.000.000	238.713	7.500.000.000	241.936	8.000.000.000	245.323	9.000.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	Jumlah sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	765	7.000.000.000	865	7.500.000.000	965	8.000.000.000	1.015	9.000.000.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	750	2.000.000.000	850	2.500.000.000	950	3.000.000.000	1.000	4.000.000.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	15.000	950.000.000	15.525	1.800.000.000	16.146	3.110.000.000	16.873	1.900.000.000

	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi hasil budidaya laut dan payau dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)	10.750	550.000.000	11.288	1.400.000.000	11.852	2.710.000.000	12.444	1.500.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	1	100.000.000	1	120.000.000	1	1.400.000.000	1	160.000.000
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia	2	150.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah produksi hasil budidaya tawar dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)	1.300	400.000.000	1.365	400.000.000	1.433	400.000.000	1.504	400.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000

	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
4.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur									
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	235.650	20.000.000.000	238.713	29.000.000.000	241.936	29.000.000.000	245.323	29.000.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	Jumlah sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	765	15.000.000.000	865	21.000.000.000	965	21.000.000.000	1.015	21.000.000.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000	15	5.000.000.000
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7	5.000.000.000	7	8.000.000.000	7	8.000.000.000	7	8.000.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Pelabuhan	5.000.000.000	7 Pelabuhan	8.000.000.000	7 Pelabuhan	8.000.000.000	7 Pelabuhan	8.000.000.000

*) jika tidak ada, dikolom dikasih keterangan== tidak ada===

Program/Kegiatan PPRG

No.	Program /Kegiatan	Indikator	Target							
			2023		2024		2025		2026	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DKP)	79,00	450.000.000	79,50	490.000.000	80,00	510.000.000	80,50	540.000.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (DKP)	10	450.000.000	10	490.000.000	10	510.000.000	10	540.000.000
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	350.000.000	6	370.000.000	6	380.000.000	6	400.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	100.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	235.650	115.000.000	238.713	200.000.000	241.936	175.000.000	245.323	220.000.000
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100	50.000.000	150	65.000.000	200	75.000.000	250	100.000.000
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang di terbitkan	100	50.000.000	150	65.000.000	200	75.000.000	250	100.000.000

	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Berukuran sampai 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	200	65.000.000	250	75.000.000	300	100.000.000	350	120.000.000
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang di terbitkan	200	65.000.000	250	75.000.000	300	100.000.000	350	120.000.000
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				30.000.000				
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	1	30.000.000				

	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	0	-	1	30.000.000	-	-	-	-
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	1	30.000.000				
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	15000		15.525		16.146		16.873	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan budidaya lintas Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi yang diterbitkan	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000

	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko yang tersusun	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
4.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	22410	350.000.000	22.810	350.000.000	23.310	350.000.000	23.910	350.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (rekomendasi)	9	350000000	6	350000000	6	350000000	6	350000000
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi yang telah diterbitkan	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000

	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang telah diterbitkan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
5.	Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung	24	1.450.000.000	25	1.750.000.000	25	2.050.000.000	27	2.400.000.000
	Penerbitan Izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	diterbitnya rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi	24	700000000	25	750000000	25	800000000	27	900000000
	penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Diterbitkannya rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi	24	350.000.000	25	375.000.000	26	400.000.000	27	450.000.000
	pencatatan dan pengadministrasian izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut	tercatatnya izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut	24	350.000.000	25	375.000.000	26	400.000.000	27	450.000.000
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	kelompok masyarakat yang diberdayakan	3	750000000	4	1000000000	5	1250000000	6	1500000000

	pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	meningkatnya kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3	300.000.000	4	400.000.000	5	500.000.000	6	600.000.000
	pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	terpenuhi pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	3	450.000.000	4	600.000.000	5	750.000.000	6	900.000.000

*) jika tidak ada, dikolom dikasih keterangan== tidak ada===

Program/Kegiatan INOVASI

No.	Program /Kegiatan	Indikator	Target							
			2023		2024		2025		2026	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			700.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000
		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	7,00	700.000.000	3	310.000.000	3	320.000.000	3	330.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (rekomendasi)	5	500.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000

	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko yang tersusun	5	500.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pemetaan dan pemantauan yang tersusun	-	200.000.000	-	110.000.000	-	120.000.000	-	130.000.000
		Tersedianya data informasi pasar produk hasil perikanan (laporan)	2		1		1		1	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	2	200.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi hasil budidaya laut dan payau dalam 1 daerah Provinsi (Ton/Tahun)	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000

3	Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung	12	550.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	450.000.000
	Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	luasan ruang laut yang dikelola	12	550.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	450.000.000
	mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	12	550.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	450.000.000